

**ANALISIS KINERJA PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN
REALISASI ANGGARAN DAN KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN
TERHADAP PSAP 02 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

OLEH :

Siti Nurul Atiqah

NIM :

0502161004

Program Studi :

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**ANALISIS KINERJA PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN
REALISASI ANGGARAN DAN KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN
TERHADAP PSAP 02 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN

Sumatera Utara



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Nurul Atiqah**
Nim : 0502161004
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 02 Oktober 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Nangka II No.1 Perumnas BSP

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KINERJA PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TERHADAP PSAP 02 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 19 April 2021

membuat pernyataan



Siti Nurul Atiqah
Siti Nurul Atiqah

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS KINERJA PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TERHADAP PSAP 02 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

Siti Nurul Atiqah

Nim. 0502161004

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 19 April 2021

Pembimbing I



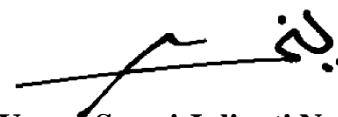
Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Pembimbing II



Kusni Lawaty, Se,Ak.M
NIDN. 2014068001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi
Syariah



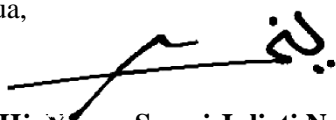
Hj. Yenny Samri Julianti Nst, MA
NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS KINERJA PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TERHADAP PSAP 02 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG” an. Siti Nurul Atiqah, NIM. 0502161004 Prodi Akuntansi Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 08 Juni 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

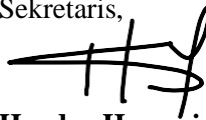
Medan, 08 Juni 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Dr. Hj. Yenny Samri Juliati Nst., M.A
NIDN. 2001077903

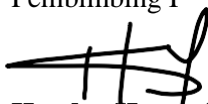
Sekretaris,



Hendra Harmain, M.Pd
NIDN. 2010057302

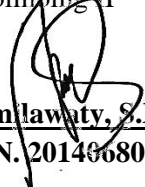
Anggota

Pembimbing I



Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Pembimbing II



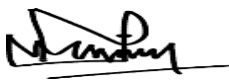
Kusmawaty, S.E, Ak, M.Ak
NIDN. 2014068001

Penguji I



Dr. Nurlaila, M.A
NIDN. 2021057503

Penguji II



Nurwani, M.Si
NIDN. 0126038901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Siti Nurul Atiqah, 2021. Analisis Kinerja Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2020. Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd dan Pembimbing Skripsi II oleh Ibu Kusmilawaty, SE, Ak.M.Ak

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada BPKAD. Objek penelitian yaitu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis varian pendapatan dapat dikategorikan baik, analisis pertumbuhan pendapatan pendapatan dinilai positif derajat desentralisasi dinilai kurang baik, rasio efektivitas PAD menunjukkan sangat efektif. Sedangkan analisis varian belanja dapat dikategorikan baik, analisis keserasian belanja menunjukkan belanja operasi dinilai cukup efisien. Dan kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan Daerah terhadap PSAP 02, terdapat 14 paragraf yang sesuai dan 3 paragraf belum sesuai.

Kata Kunci : Kinerja APBD, Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pendapatan, Kinerja Belanja, Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 02.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, walaupun dengan langkah tertatih-tatih dan jalan penuh lika-liku dimasa pandemi covid-19. Namun, dengan penuh keyakinan dan ridho Allah Subhana wa ta'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sembari dengan senantiasa berdo'a semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi-Nya. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Rasul Al-Amin Muhammad Shallallahu`alaihi wa sallam yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang hak lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam ini.

Untuk melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syariat-syariat untuk mencapai gelar sarjana Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul “ **ANALISIS KINERJA PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TERHADAP PSAP 02 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan, namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terkhusus kepada kedua orangtua saya, yaitu Ayahanda **Zainal** dan Ibu **Yusrida Deviyanti**. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak bisa ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Hj. Dr. Yenni Samri Juliati Nst, S.HI, MA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas motivasi yang membantu penulis lebih percaya diri untuk terus menyelesaikan skripsi ini juga kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan Bapak dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala.
5. Ibu KusmiLawaty, SE,Ak.M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas motivasi yang membantu penulis lebih percaya diri untuk terus menyelesaikan skripsi ini juga kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan Ibu dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas warisan ilmu dan curahan pengetahuan yang secara ikhlas telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Saudara-saudaraku tercinta Agustina dan Alm. Irwansyah, yang senantiasa membantu dan memberikan semangat serta dukungan baik

materil maupun spiritual dengan sabar dan juga disertai doanya dalam mewujudkan cita-cita penulis.

8. Keluarga besar Akuntansi Syariah angkatan 2016 terkhusus kelas B yang selama ini telah berjuang bersama selama masa perkuliahan, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada para sahabat-sahabat saya yang selalu berada disamping saya, berjuang bersama saya dalam susah maupun senang Wilda, Hani, Angela, Ricca, Nate, Novi, Dimas, Mursidi dan Adji makasih udah mau di rusuhi selama pembuatan skripsi.
10. Teman-teman KKN Kelompok 115 Kec. STM Hilir Desa Siguci yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Terima kasih atas kesan dan pesan selama 1 bulan kebersamaan menyelesaikan satu dari 3 tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca dimasa yang akan datang. Sekali lagi penulis ucapkan ribuan terima kasih.

Medan, April 2021

Penulis

Siti Nurul Atiqah
Nim. 0502161004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SURAT PERNYATAAN | i |
| SURAT PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Batasan Masalah | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | 8 |
| A. Kajian Teoritis | 8 |
| 1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah | 8 |
| 2. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah | 10 |
| 3. Kinerja dan Pengukuran kinerja | 12 |
| 4. Akuntansi Keuangan Daerah | 15 |
| 5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | 16 |
| 6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 16 |
| 7. Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah | 16 |
| 8. Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah | 21 |
| 9. Pengelola Keuangan Daerah | 24 |
| 10. Analisis Kinerja Keuangan Daerah | 26 |
| 11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 | 31 |
| 12. Laporan Realisasi Anggaran Menurut Prespektif Islam | 33 |
| B. Peneliti Terdahulu | 36 |
| C. Kerangka Konseptual | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Pendekatan Penelitian | 40 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 40 |
| C. Objek dan Subjek Penelitian | 40 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 41 |
| E. Defenisi Operasional | 41 |
| F. Teknik Analisis Data | 46 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 46 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Hasil Penelitian | 47 |
| B. Deskriptif Data Penelitian | 51 |
| C. Pembahasan..... | 67 |
| BAB V PENUTUP..... | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN..... | 80 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 85 |

DAFTAR TABEL

No. Tabel Halaman

| | |
|---|----|
| 1.1 Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017-2019..... | 2 |
| 1.2 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017-2019..... | 3 |
| 1.3 Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017-2019..... | 4 |
| 2.1 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah | 27 |
| 2.2 Kriteria Penilaian Efektifitas PAD..... | 28 |
| 2.3 Kriteria Penilaian Keserasian Belanja | 29 |
| 2.4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah..... | 31 |
| 2.5 Kerangka Konseptual..... | 37 |
| 3.1 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah | 43 |
| 3.2 Kriteria Penilaian Efektifitas PAD..... | 43 |
| 3.3 Kriteria Penilaian Keserasian Belanja | 44 |
| 3.4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah..... | 46 |
| 4.1 Perhitungan Varian Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang | 52 |
| 4.2 Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang..... | 53 |
| 4.3 Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah | 53 |
| 4.4 Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah Kabupaten Deli Serdang | 54 |
| 4.5 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD..... | 54 |
| 4.6 Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang | 55 |
| 4.7 Perhitungan Varian Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang | 56 |
| 4.8 Kriteria Penilaian Keserasian Belanja | 57 |
| 4.9 Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Deli Serdang..... | 57 |
| 4.10 Perhitungan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang..... | 58 |
| 4.11 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah..... | 59 |
| 4.12 Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang | 59 |
| 4.13 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang | 60 |

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Halaman

| | |
|------------------------------|----|
| 2.1 Kerangka Konseptual..... | 39 |
|------------------------------|----|

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD diatur oleh PERDA. Tahun anggaran APBD mencakup 1 Januari hingga 31 Desember. APBD diratifikasi dan diumumkan oleh peraturan daerah yang harus dipatuhi oleh DPRD. APBD ini diperlukan agar pelayanan publik daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mampu mengurangi pengangguran sehingga menurunkan angka kemiskinan.¹

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa penting ekonomi pada entitas ekonomi dilindungi pemerintah daerah.² Akuntansi Keuangan Daerah diperlukan karena semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan melaporkan hasil secara transparan kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada dasarnya merupakan laporan anggaran Lembaga Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan daerah kepada pemerintah pusat yang berupa analisis pendapatan dan analisis pembiayaan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan apa yang telah dianggarkan dan

¹ Diah Nurdiwaty dan Badruz Zaman (ed.) *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri*, Jurnal Ekonomika Bisnis, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Malang, h. 32

² Erlina, et.al. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 3

dengan realisasi periode sebelumnya. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, jika:

- 1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- 3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Pendapatan | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rp 849.286.151.151,13 | Rp 729.648.594.488,68 | Rp 825.375.281.296,75 |
| Pendapatan Pajak Daerah | Rp 553.610.032.994,03 | Rp 558.329.598.200,97 | Rp 652.563.113.786,79 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | Rp 59.691.146.500,00 | Rp 38.794.665.624,00 | Rp 34.182.703.026,25 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 20.064.116.991,00 | Rp 35.636.472.727,00 | Rp 22.017.441.824,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp 215.920.854.666,10 | Rp 96.887.857.936,71 | Rp 116.612.022.659,71 |
| PENDAPATAN TRANSFER | Rp 2.476.079.377.351,00 | Rp 2.478.181.849.298,00 | Rp 2.279.470.240.722,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 1.987.560.013.808,00 | Rp 1.992.298.798.336,00 | Rp 2.000.833.953.938,00 |
| Bagi Hasil Pajak | Rp 58.285.466.161,00 | Rp 64.707.603.132,00 | Rp 52.300.753.409,00 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | Rp 1.202.371.818,00 | Rp 3.787.195.865,00 | Rp 3.908.912.104,00 |
| Dana Alokasi Umum | Rp 1.468.561.952.000,00 | Rp 1.468.561.952.000,00 | Rp 1.513.584.154.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | Rp 459.510.223.829,00 | Rp 455.242.047.339,00 | Rp 431.040.134.425,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | Rp 303.060.286.000,00 | Rp 271.727.069.600,00 | Rp - |
| Dana Penyesuaian Dana Desa | Rp 303.060.286.000,00 | Rp 271.727.069.600,00 | Rp - |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | Rp 185.459.077.543,00 | Rp 162.095.738.528,00 | Rp 278.636.286.784,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Rp 185.459.077.543,00 | Rp 162.095.738.528,00 | Rp 278.636.286.784,00 |
| Bantuan Keuangan | Rp - | Rp 52.060.242.834,00 | Rp - |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya | Rp - | Rp 52.060.242.834,00 | Rp - |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Rp 6.674.312.000,00 | Rp 155.474.139.599,07 | Rp 468.210.867.600,00 |
| Pendapatan Hibah | Rp 6.674.312.000,00 | Rp 155.474.139.599,07 | Rp 161.823.960.000,00 |
| Pendapatan lainnya | Rp - | Rp - | Rp 306.386.907.600,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 3.332.039.840.502,13 | Rp 3.363.304.583.385,75 | Rp 3.573.056.389.618,75 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, Diolah:2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan secara positif. Pada tahun 2017 sebesar 3,36% dan pada tahun 2019 sebesar 3,57%. Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah masih sangat kecil dibandingkan dana perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemberian dana dari Pemerintah Pusat dan merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia di mana PAD lebih kecil dibanding penerimaan yang berasal dari pusat.

Semakin besar porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan total, maka akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.³

Tabel.1.2.
Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| TAHUN | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BELANJA | Rp 3.377.738.242.083,88 | Rp 3.422.610.573.014,61 | Rp 3.601.407.369.876,00 |
| BELANJA OPERASI | Rp 2.635.905.059.378,71 | Rp 2.750.435.884.963,70 | Rp 2.891.303.708.895,50 |
| Belanja Pegawai | Rp 1.337.226.110.666,00 | Rp 1.368.382.862.625,00 | Rp 1.426.203.584.060,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 767.900.875.243,71 | Rp 849.819.593.705,70 | Rp 926.112.632.460,50 |
| Belanja Hibah | Rp 36.137.961.800,00 | Rp 67.270.475.142,00 | Rp 23.690.410.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | Rp 494.640.111.669,00 | Rp 464.962.953.491,00 | Rp 515.297.082.375,00 |
| BELANJA MODAL | Rp 741.456.897.032,63 | Rp 670.584.193.040,91 | Rp 703.280.070.640,29 |
| Belanja Modal Tanah | Rp 9.906.495.100,00 | Rp 4.779.281.950,00 | Rp 17.972.661.400,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 86.487.973.345,63 | Rp 92.782.929.035,12 | Rp 112.483.290.455,46 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 148.303.479.560,00 | Rp 148.303.288.275,77 | Rp 131.336.367.981,83 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 460.088.450.911,00 | Rp 391.099.656.542,00 | Rp 417.973.501.999,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp 36.670.498.116,00 | Rp 33.619.037.238,02 | Rp 23.514.248.804,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | Rp 376.285.672,54 | Rp 1.590.495.010,00 | Rp 6.823.590.340,21 |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 376.285.672,54 | Rp 1.590.495.010,00 | Rp 6.823.590.340,21 |
| JUMLAH BELANJA | Rp 3.377.738.242.083,88 | Rp 3.422.610.573.014,61 | Rp 3.601.407.369.876,00 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, Diolah: 2020

Pada Tabel 1.2. nilai pertumbuhan belanja yaitu dengan tingkat pertumbuhan tahun 2019 sebesar 0,52% dan pertumbuhan belanja pada tahun

³ Ni Luh Nana Putri Ani dan A. A.N.B. Dwirandra (ed.) *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*, Jurnal E- Jurnal Akuntansi Udayana 6.3, 2014, h. 490

2017 sebesar 1.32%. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibanding membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya kebocoran, maka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan.

Tabel 1.3
Realisasi APBD Kab. Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Tahun | Pendapatan Daerah | | + / | % |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| 2017 | Rp.3.398.428.422.033,00 | Rp.3.332.039.840.502,13 | (Rp. 166.208.581.530,87) | (95,24) |
| 2018 | Rp.3.640.579.921.809,07 | Rp. 3.363.304.583.385,75 | (Rp.277.275.338.423,32) | (92,38) |
| 2019 | Rp.4.009.331.169.223,00 | Rp.3.573.056.389.618,75 | (Rp.436.274.779.604,25) | (89,12) |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, Diolah: 2020

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui pendapatan asli Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Deli Serdang sebesar 95.24% dengan total realisasi sebesar Rp. 3.332.039.840.502,13%. Di tahun berikutnya di tahun 2018 sebesar 92,38% dengan total realisasi sebesar Rp. 3.363.304.583.385,75. Di tahun ketiga di 2019 sebesar 89,12% dengan total realisasi sebesar Rp. 3.573.056.389.618,75. Dengan penurunan pendapatan asli daerah tersebut, maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu memberikan alokasi belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara memperbaiki fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di Kabupaten Deli Serdang. Infrastruktur dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Melalui penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi.

Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut memiliki tujuan-tujuan atau target yang akan dicapai.⁴

Adapun yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada analisis dan rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dan juga pemilihan objek. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja, sedangkan rasio yang digunakan adalah rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja. Sedangkan penelitian sebelumnya kebanyakan menghilangkan salah satunya. Pemilihan objek, peneliti memfokuskan hanya Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019.

Berdasarkan latar belakang diatas dan pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian Penyajian Laporan Terhadap PSAP 02 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017-2019”**.

⁴ Mahsun, Mohammad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. (Yogyakarta: BPFE, 2009), h 25.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum mandirinya Kabupaten Deli Serdang dalam hal pendapatan.
2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Deli Serdang yang sifatnya mengalami kenaikan tidak signifikan.
3. Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih memprioritaskan Belanja Operasi dari pada Belanja Modal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: Analisis Kinerja Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian penyajian LRA Terhadap PSAP 02 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017-2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Deli Serdang jika dilihat menggunakan Analisis varian Pendapatan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan, Derajat Desentralisasi, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Deli Serdang jika dilihat menggunakan Analisis Varian Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja?
3. Bagaimana kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang terhadap PSAP 02 Tahun 2010?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Analisis varian pendapatan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan, Derajat Desentralisasi, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Analisis Varian Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang terhadap PSAP 02 Tahun 2010.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dan sebagai informasi tambahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah setelah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintah Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 tentang Dana Perimbangan. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian APBD juga terdapat dalam PP No.58.

Anggaran Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran.⁵

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah di mana, satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran.⁶

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan

⁵ Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (3rd ed). (Yogyakarta: BPF, 2009). h.146

⁶ Abdul Halim, *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat : Jakarta, 2013). h. 21

ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan bagian dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

APBD mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:⁷

a. Sebagai Alat Perencana

APBD dibuat oleh Pemda untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, biaya yang dibutuhkan, serta hasil yang diperoleh dari belanja yang dilakukan pemerintah. Hal ini berarti dalam APBD, setidaknya-tidaknya tergambar tiga komponen utama yaitu:

- 1) Tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan,
- 2) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
- 3) Hasil yang akan diperoleh dari suatu kegiatan tersebut.

b. Sebagai Alat Pengendalian

APBD dapat memberikan detail atas pendapatan yang diperoleh Pemda serta pengeluaran (belanja) yang dilakukan Pemda. Dengan demikian, maka APBD dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Dengan demikian setiap kegiatan atau program dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), hanya jelas sumber pembiayaannya, misal berapa dana bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan berapa besar dari DAU (Dana Alokasi Umum), atau mana kegiatan yang dilakukan dengan biaya dari PAD murni dan mana dari DAU murni.

c. Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mempergunakan APBD. Pemda dapat melakukan prediksi-prediksi serta estimasi ekonomi. Kegiatan-kegiatan atau program dalam APBD harus juga dipertimbangkan sebagai suatu estimasi.

⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), h. 122

d. Sebagai Alat Politik

APBD adalah *political tool* yang berfungsi sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e. Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

APBD merupakan alat koordinasi antar bagian dalam sistem kerja pemerintah. APBD yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkaran eksekutif dan legislatif sebagaimana diikrarkan dalam bentuk visi dan misinya pada saat kampanye.

f. Sebagai Alat Penilaian Kinerja

APBD merupakan komitmen dan *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

g. Sebagai Alat Motivasi

APBD dapat digunakan sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien, dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Struktur dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan/atau uang jasa), dana darurat, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.⁸ Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.⁹ Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

⁸ Erlina Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, (Medan: Brama Ardian, 2013) h. 120

⁹ Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Pemerintahan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 40

2) Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja dan jasa, dan belanja modal.

3. Kinerja dan Pengukuran Kinerja

a. Pengertian kinerja

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.¹⁰

b. Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu, menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*.¹¹

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam pencapaian tujuan.

¹⁰ Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.(Yogyakarta : Penerbit BPFE, 2009). h. 25

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat*, (Yogyakarta : CV Andi, 2009), h. 121.

Pengukuran kinerja adalah manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan.

c. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah:

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang mestinya. Pemimpin dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.

2) Menyiapkan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap. *Skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak.

3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik dari pada sekarang.

4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan

Keputusan pemberian *reward* dan *punishment* Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau *punishment* misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.

5) Memotivasi Pegawai

Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

6) Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang dipublikasikan bagi pihak internal maupun eksternal.¹²

d. Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja adalah:

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan

¹² Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik*.(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007) h 14.

untuk menilai kinerja manajemen.

- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 5) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 6) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 7) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

4. **Akuntansi Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan secara rinci bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan berbagai prosedur manual maupun yang sudah terkomputerisasi mulai dari kegiatan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasional pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD, yang dilakukan dalam berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum.

Berdasarkan dua sudut pandang tentang pengertian Sistem Akuntansi Daerah di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sistem akuntansi daerah merupakan suatu serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga laporan keuangan dalam hal pertanggungjawaban pelaksana APBD

yang biasa dilakukan secara manual atau memanfaatkan aplikasi komputer.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

5. **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi seperti komputer.

6. **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

7. **Komponen- Komponen Laporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.¹³

¹³ Moermahadi S. Djanegara, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Teori, Praktik, dan Permasalahan*, (Bogor: Kesatuan Press, 2017), h. 2

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan sumber pendapatan, lokasinya, dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan alokasinya.

Menurut PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam laporan realisasi anggaran unsur yang dicakup secara langsung terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pemuatan sebagai berikut:

1) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3) Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4) Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

6) Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹⁴ Sedangkan ketidak tercapaian target belanja disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, kegiatan belum selesai, dan kegiatan yang batal.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih disusun oleh entitas pelaporan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan unsur-unsur:

¹⁴ Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerangka Konseptual, Paragraf 63

- 1) Saldo anggaran lebih awal periode
- 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- 4) Koreksi kesalahan tahun pembukuan sebelumnya
- 5) Saldo anggaran lebih akhir periode.¹⁵

c. Neraca

Neraca disebut juga dengan laporan posisi keuangan, ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada suatu saat tertentu.

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan keuangan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan Laporan Operasional yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

¹⁵ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h.118

4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas penerimaan pusat/daerah selama satu periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang aliran kasnya masuk atau keluar dari bendahara umum Negara/Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar seperti kewajiban kontijensi dan komitmen.¹⁶

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif dari angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang

¹⁶ Nurlaila, *Pengantar Akuntansi*, (Bandung; Citapusaka Media ,2014), h.32

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

8. **Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan diatasi oleh pembuat standar dalam menyusun standar penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.¹⁷

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan Laporan Operasional beban aset kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

¹⁷ Bambang Pamungkas, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*, (Bogor: Kesatuan Press, 2013), h.113

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, ataupun pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau

mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Perioditas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan menggunakan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan dengan penggunaan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan andal.

9. **Pengelola Keuangan Daerah**

a. **Pengertian Keuangan Daerah**

Dalam Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban merupakan kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- 3) Pengeluaran daerah.
- 4) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- 5) Kekayaan lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dengan dan atau kepentingan umum.

10. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan dua cara,¹⁸ yaitu:

a. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

1) Analisis Varian Pendapatan

Analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, anggaran pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.¹⁹

$$\text{Varian Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran}$$

2) Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.²⁰ Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya meningkat atau sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.

Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Thn } t = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } t-1}{\text{Pendapatan Thn } t}$$

¹⁸ Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor publik.(Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2007) h.122

¹⁹ Ibid h. 123

²⁰ Ibid h. 124

3) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derjat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 2.1.

Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah

| Kemampuan Desentralisasi | Rasio Derajat Desentralisasi (%) |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sangat Baik | >50% |
| Baik | 25-50 |
| Kurang Baik | 10-25 |
| Tidak Baik | <10 |

Sumber : Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum (2015)

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan.²¹ Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang

²¹ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007) h. 129

ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

| Kriteria Efektivitas | Rasio Efektivitas |
|----------------------|-------------------|
| Sangat Efektif | >100% |
| Efektif | 100% |
| Cukup efektif | 90%-99% |
| Kurang efektif | 75%-89% |
| Tidak efektif | <75% |

Sumber : Mahmudi (2011: 171)

c. Analisis Kinerja Belanja Daerah

1) Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah.²² Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

2) Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilitas. Agar fungsi anggaran tersebut belanja dengan baik maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.²³

Analisis keserasian belanja dikategorikan, sebagai berikut:

²² Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007) h. 143

²³ Ibid h..148

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

| Kriteria Keserasian Belanja | Rasio Keserasian |
|-----------------------------|------------------|
| Tidak Serasi | 0%-20% |
| Tidak Serasi | 0%-20% |
| Kurang Serasi | >20%-40% |
| Cukup Serasi | >40%-60% |
| Serasi | >60%-80% |

Sumber: Mahsun, 2006 dalam Gramini, et. all (2017)

d. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai posisi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.²⁴ Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{RBOTB} = \frac{\text{Rasio Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

e. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat

²⁴ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007) h. 150

jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dirumuskan:

$$\text{RBMTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

f. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini, hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensi nya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.²⁵ Rasio belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja} \times 100\%}{\text{Anggaran Belanja}}$$

²⁵ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007) h. 152

Tabel 2.4
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

| Kriteria Efisiensi | Rasio Efisiensi |
|---------------------|-----------------|
| Efisiensi | < 100% |
| Efisiensi Berimbang | =100% |
| Tidak Efisien | >100% |

Sumber : Mahsun (2009: 187) dalam Rahmayati (2016)

**11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010**

- a. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
 - 1) Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tujuan pelaporan realisasi adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran
 - a) Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
 - b) Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan Negara/daerah.
- c. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

- 2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 3) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- 4) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
 - c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) Cakupan entitas pelaporan;

- c) Periode yang dicakup, mata uang pelaporan; dan
- d) Satuan angka yang digunakan.

12. Laporan Realisasi Anggaran Menurut Perspektif Syariah

Istilah anggaran berkaitan dengan konsep perencanaan yang akan di pertanggung jawabkan perencanaan dalam syariah islam adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai satu tujuan yang dikehendaki dengan manajemen keuangan, yaitu kegiatan perencanaan, penggaran, pemeriksaan, pengelolaan, serta pengendalian, dalam pencarian dan penyimpanan dana/harta kekayaan/aset, yang tidak bertentangan dengan syari`ah dan berbasis hukum islam yang dilandasi oleh Al-Qur`an dan Hadist. Sesuatu yang diatur dalam syariat sebagaimana perencanaan anggaran keuangan yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan. Dalam hal ini Allah memerintahkan manusia dalam melakukan perencanaan/anggaran keuangan disebutkan dalam islam sebagai landasan utama dalam menjalankan pertanggungjawaban keuangan dan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban dan penyajian informasi yang akurat. Islam dan akuntansi berperan dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Akuntansi lebih dominan dalam mempengaruhi pertanggungjawaban/ pelaporan keuangan. Sebagai landasan harus dilaksanakannya pertanggungjawaban keuangan, pemerintah tersebut diatur dalam surah Al-Baqarah 282 yang isinya mengenai perintah untuk melakukan proses akuntansi dan pengungkapan laporan keuangan atas setiap transaksi.²⁶ Sebagai firman Allah dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah 282 sebagai berikut:

²⁶ M. Syahman Sitompul, et.al. "Implementasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Masjid Di Sumatera Timur" dalam jurnal akuntansi, Vol 3, (2): Juli-Des 2016, h. 204-224.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلْتُمْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai mana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian),

maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Q.S Al-Furqan ayat 67 :

﴿67 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

Artinya: "dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak pula (kikir), dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian".²⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengalokasikan anggaran seharusnya tidak menyimpang dari apa yang sudah direncanakan. Ayat di atas menerangkan bahwa di dalam melakukan penganggaran maka harus dianggarkan sesuai dengan kepentingan dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk bekerja mencari harta secara tidak berlebih-lebihan, serta merealisasikan harta sesuai dengan kepentingan saat membelanjakan harta, tidak bersifat lalai sampai mengurangi dari kewajiban sehingga tidak mencakup. Maka dari itu, apabila membelanjakan harta dengan adil dan penuh dengan kebaikan dan tidak berlaku boros. Selain penjelasan mengenai perencanaan penyusunan anggaran di atas, terdapat juga konsep akuntabilitas anggaran sektor publik, dan ini di jelaskan dalam Q.S surah Al-An`am ayat 135:

﴿135 أَفَلَا يَتَّقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فَلَا يَنْفِرُونَ كَمَا نَزَلْنَا عَلَىٰ مِثْلِهِ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّا يَتَّقُونَ﴾

Artinya: "wahai kaumku, berbaurilah menurut kedudukanmu yaitu teruslah kau berjalan sesuai jalanmu, akupun akan berbuat demikian, kelak kamu akan tahu siapa yang mendapat tempat terbaik di akhirat

²⁷ Q.S Al-Furqan Ayat 67

nanti, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung di dunia dan di akhirat.”²⁸

Disini dijelaskan bahwa tanggung jawab seseorang berkaitan dengan kewajibannya yang dibebankan kepadanya. Artinya segala sesuatu yang diperbuat harus mampu dipertanggung jawabkan perbuatannya itu. Begitu juga dengan pemerintah, semakin tinggi kedudukannya di masyarakat maka semakin tinggi pula yang akan menjadi tanggungjawabnya. Berkaitan dengan anggaran maka dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dianggarkan dalam periode pemerintahannya, serta bertanggung jawab untuk merealisasikannya. Dalam mempertanggungjawabkan juga harus sesuai prosedur yang telah di tetapkan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5

| No | Nama | Judul | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|----|-----------------------------------|---|------------------------|--|
| 1 | Gramini, Kasim, dan Biding (2017) | Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Pada Periode Tahun 2011-2015 | Deskriptif Kuantitatif | Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja APBD Kabupaten Morowali dilihat dari analisis kinerja pendapatan daerah Kabupaten Morowali memiliki kinerja kurang baik. Sedangkan jika dilihat dari analisis kinerja belanja daerah: Analisis Varians Belanja dinilai baik karena memiliki selisih positif, Rasio Keserasian belanja operasi dinilai serasi sedangkan belanja modal dinilai kurang serasi, dimana Kabupaten Morowali lebih |

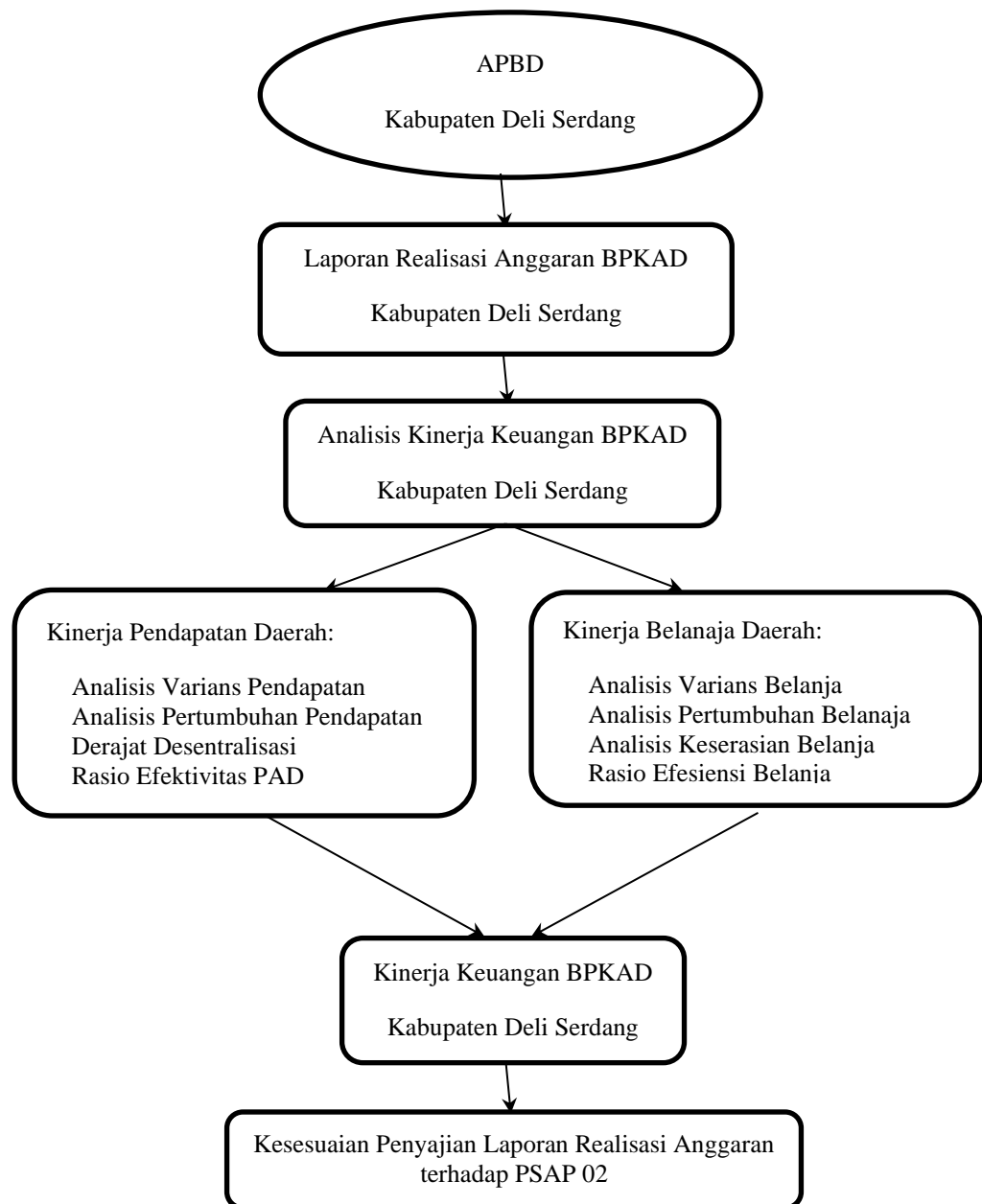
²⁸ Q. S Al-An'am Ayat 135

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|---|
| | | | | memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal, analisis efisiensi belanja dinilai efisien. |
| 2 | Kusumadewi dan Ilat (2016) | Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014 | Deskriptif Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan. |
| 3 | Saputra, Suwandra, dan Yudiatmaja (2016) | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014 | Deskriptif Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa varian pendapatan termasuk dalam kategori baik, rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif, varian belanja termasuk dalam kategori baik, rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional, rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien. |
| 4 | Katit dan Pinatik (2016) | Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian selama tahun 2013-2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Papua memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Papua lebih kecil dari Anggaran yang |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | telah direncanakan. Dari beberapa analisis yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat sudah menunjukkan hasil yang positif dalam kinerja belanja. |
| 5 | Liando dan Elim (2016) | Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Sangihe | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menyatakan bahwa analisis varians belanja pada Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2011-2014 menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi anggaran. |
| 6 | Tulangow dan Runtu (2016) | Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian pada APBD Kabupaten Minahasa, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun penelitian pemerintah Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian belanjanya dengan tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. |

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan dan mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Berdasarkan telaah pustaka serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini menjelaskan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Dari bagan kerangka di atas, peneliti ingin menganalisis Varians Pendapatan Belanja, Pertumbuhan Pendapatan Belanja, Derajat Desentralisasi, Keserasian Belanja, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan judul yang telah dikemukakan maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi deskriptif. Studi deskriptif kualitatif membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menganalisis data.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yakni jenis penelitian menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya yang menggunakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamatkan di Jl. Mawar No.8 Lubuk Pakam.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sejak 1 juni 2020 sampai 23 Desember 2020

C. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah

²⁹ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Citapusaka Media,2014),h..35

penelitian. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang dapat berupa orang, barang, atau lembaga (Organisasi) yang utama memiliki sifat keadaanya terkait topik penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif laporan realisasi anggaran tahun 2017-2019 yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.³⁰ Data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu data Laporan Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2017-2019 dan diperoleh secara langsung dari Sekretariat BPKAD Kabupaten Deli Serdang

E. Definisi Operasional

a. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya,

³⁰ Nur Indriantoro, et. all, 2002. "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen"(Yogyakarta: Edisi Pertama. BPFE, 2002) h. 147

anggaran pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.³¹

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

b. Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.³² Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan meningkat atau sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Thn } t = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } t-1}{\text{Pendapatan Thn } t}$$

c. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

³¹

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik*.(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007) h. 123

³² Ibid h. 124

Tabel. 3.1
Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah

| Kemampuan Desentralisasi | Rasio Derajat Desentralisasi (%) |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sangat Baik | >50% |
| Baik | 25-50 |
| Kurang Baik | 10-25 |
| Tidak Baik | <10 |

Sumber : Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum (2015)

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan.³³ Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

| Kriteria Efektivitas | Rasio Efektivitas |
|----------------------|-------------------|
| Sangat Efektif | >100% |
| Efektif | 100% |
| Cukup efektif | 90%-99% |
| Kurang efektif | 75%-89% |
| Tidak efektif | <75% |

Sumber : Mahmudi (2011: 171)

³³ Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011) h. 170

e. Analisis Kinerja Belanja Daerah

a) Analisis Varians Belanja

Dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah.³⁴ Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

b) Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja, hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar harmonisasi belanja.³⁵ Analisis keserasian belanja dikategorikan, sebagai berikut:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

Tabel 3.3

Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

| Kriteria Keserasian Belanja | Rasio Keserasian |
|-----------------------------|------------------|
| Tidak Serasi | 0%-20% |
| Kurang Serasi | >20%-40% |
| Cukup Serasi | >40%-60% |
| Serasi | >60%-80% |

Sumber: Mahsun, 2006 dalam Gramini, et. al (2017)

f. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total operasi dengan total belanja daerah.³⁶ Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai

³⁴ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007) h. 143

³⁵ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007) h. 148

³⁶ Ibid. h. 150

posisi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. menyebutkan bahwa Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{RBOTB} = \frac{\text{Rasio Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

g. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Menurut Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dirumuskan:

$$\text{RBMTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

h. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini, hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka

mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.³⁷ Rasio belanja dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Table 3.4

Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

| Kriteria Efisiensi | Rasio Efisiensi |
|---------------------|-----------------|
| Efisiensi | < 100% |
| Efisiensi Berimbang | =100% |
| Tidak Efisien | >100% |

Sumber : Mahsun dalam Rahmayati (2016)

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi Studi dokumentasi suatu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen laporan realisasi anggaran dan pengumpulan data yang diperoleh dimana penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan kemudian dilakukan pengkajian serta penalaran data-data yang berkaitan dengan masalah yang diamati.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi lapangan, melakukan observasi langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data dan mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti.
2. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data tentang objek yang akan diteliti berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang.

³⁷ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2007) h. 152.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Instansi

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonomi sesuai dengan Undang-undang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Dibuat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, Ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986.

Sesuai dengan dikeluarkan UU Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini terdiri atas 22 Kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 November tahun 2007 secara resmi Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Deli Serdang terbentuk dan dipimpin oleh seorang kepala dinas.³⁸

Namun, pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Daerah No.5 tahun 2007 yang salah satu isinya membahas tentang terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang. Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang pada bulan

³⁸ Republik Indonesia. 2007. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten Deli Serdang. Diakses pada tanggal 22 februari 2018.

September tahun 2014 dan dipimpin oleh seorang kepala Badan.³⁹

3. Ruang Lingkup Instansi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang merupakan lembaga teknis daerah dan bagian dari perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas yang demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- b. Penyelenggaraan unsur pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kesekretariatan, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- f. Pengelolaan unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 4 Bidang yakni: Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset yang

³⁹ Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Diakses pada tanggal 22 februari 2018 pukul 12.00 WIB

terdiri dari 2 sub bidang yakni: sub bidang pendataan dan perawatan aset dan sub bidang pengendalian dan penghapusan aset. Bidang Aset bertugas mengurus barang bagi pengguna yang ada di lingkungan Kabupaten Deli Serdang, dimana penggunaannya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pegawai yang mengurus barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disebut dengan Pengurus Barang Pengguna.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi Pengurus Barang Pengguna di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, menyampaikan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, menyusun laporan barang semesteran dan tahunan, menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang, membuat kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan, memberi label barang milik daerah, melakukan *stock opname* barang persediaan, melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan.

Laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi proses, Substansi maupun pengawasannya bertanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretariat Daerah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang demikian, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan berbagai tugas dalam pencapaian rencana dalam program Rencana Pembangunan yang pada dasarnya dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.⁴⁰

4. Lokasi Instansi

lokasi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang berada di jalan Mawar No.8 Lubuk Pakam yang berada di kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

⁴⁰ Badan Pengelola Keuangan dan Aset. 2014. Rencana Strategis 2014-2019. h. 10.

5. Daerah Jangkauan Instansi

Daerah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang adalah daerah-daerah yang berada di kawasan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan, yaitu:

- a. Bangun Purba
- b. Batang Kuis
- c. Beringin
- d. Biru-Biru
- e. Deli Tua
- f. Galang
- g. Gunung Meriah
- h. Hamparan Perak
- i. Kutalimbaru
- j. Labuhan Deli
- k. Lubuk Pakam
- l. Namo Rambe
- m. Pagar Merbau
- n. Pancur Batu
- o. Pantai Labu
- p. Petumbak
- q. Percut Sei Tuan
- r. Sibolangit
- s. Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir)
- t. Sinembah Tanjung Muda Hulu (STM Hulu)
- u. Sunggal
- v. Tanjung Morawa

6. Visi, Misi dan Motto serta Program

a. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Anggaran yang Efektif dan Efisien.
- 3) Meningkatkan Penatausahaan Kas Daerah yang Efektif dan Optimal dalam Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Waktu Serta Pengendalian Belanja Daerah.

- 4) Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
- 5) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

c. Motto

Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel.

d. Program-program Strategis dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019:

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Deskriptif Data Penelitian

1. Analisis Kinerja Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

a. Analisis Varian Pendapatan

Analisis Varian Belanja dapat digambarkan sebagai kemampuan suatu pemerintah dalam merealisasikan pendapatan, tanpa melebihi jumlah yang dianggarkan. Hasil dari perhitungan varian pendapatan daerah:

Tabel 4.1
Perhitungan Varian Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Varian/Selisih (Rp) | Presentase (%) |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 2017 | 3.498.428.422.033,00 | 3.332.039.840.502,13 | 166.388.581.530,87 | 95,24 |
| 2018 | 3.640.579.921.809,07 | 3.363.304.583.385,75 | 277.275.338.423,32 | 92,38 |
| 2019 | 4.009.331.169.223,00 | 3.573.056.389.618,75 | 436.274.779.604,25 | 89,12 |
| Rata-rata | | | 293.312.899.852,81 | 92,25 |

Sumber : BPKAD Kabupaten Deli Serdang (diolah : 2021) dan Mahmudi (2011:162)

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa varian pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan memiliki rata-rata 92,25 persen atau sebesar Rp. 293.312.899.852,81 yang mempunyai selisih positif, artinya kinerja pendapatan daerah baik. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan, begitu sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal tersebut dinilai kurang baik.⁴¹

Dilihat dari Tahun 2017 sampai 2019 realisasi pendapatan dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kabupaten Deli Serdang sudah mampu merealisasikan anggaran pendapatan.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Berikut hasil dari perhitungan pertumbuhan pendapatan:

⁴¹ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2007) h.

Tabel 4.2
Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) | Pertumbuhan (%) | Total Pendapatan Daerah (TDP) (Rp) | Pertumbuhan (%) |
|-------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 2017 | 849.286.151.151,13 | | 3.332.039.840.502,13 | |
| 2018 | 729.648.594.488,68 | -0,16 | 3.363.304.583.385,75 | 0,01 |
| 2019 | 825.375.281.296,75 | 0,13 | 3.573.056.389.618,75 | 0,06 |

Sumber : BPKAD Kabupaten Deli Serdang (diolah : 2021) dan Mahmudi (2011:162)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2017-2019 mengalami turun naik. pertumbuhan PAD pada tahun 2018 sebesar -0,16 persen dan pertumbuhan TPD pada tahun 2018 sebesar 0,01 persen. Pada tahun 2019 pertumbuhan PAD sebesar 0,13 persen dan 0,06 persen untuk pertumbuhan TPD.

c. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD suatu daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggara desentralisasi.⁴²

Tabel 4.3
Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Daerah

| Kemampuan Desentralisasi | Rasio Derajat Desentralisasi (%) |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sangat Baik | >50% |
| Baik | 25-50 |
| Kurang Baik | 10-25 |
| Tidak Baik | <10 |

Sumber : Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum (2015)

⁴² Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2007) h.

Tabel 4.4
Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Total Pendapatan Daerah (Rp) | Rasio (%) | Kinerja |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 2017 | 849.286.151.151,13 | 3.332.039.840.502,13 | 25,49 | Baik |
| 2018 | 729.648.594.488,68 | 3.363.304.583.385,75 | 21,69 | Kurang Baik |
| 2019 | 825.375.281.296,75 | 3.573.056.389.618,75 | 23,10 | Kurang Baik |
| Rata-rata | | | 23,43 | Kurang Baik |

*Sumber : BPKAD Kabupaten Deli Serdang (diolah : 2021)
dan Mahmudi (2011:162)*

Berdasarkan Tabel 4.4 perhitungan derajat desentralisasi daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2017 sampai tahun 2019 derajat desentralisasi mengalami turun naik. Tahun 2017 sebesar 25,49%, tahun 2018 sebesar 21,69%, dan pada tahun 2019 sebesar 23,10%. Meski mengalami turun naik, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki rata-rata sebesar 23,43%, artinya kemampuan daerah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih dinilai kurang baik.

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang dianggarkan atau ditargetkan.

Tabel 4.5
Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

| Kriteria Efektivitas | Rasio Efektivitas |
|----------------------|-------------------|
| Sangat Efektif | >100% |
| Efektif | 100% |
| Cukup efektif | 90%-99% |
| Kurang efektif | 75%-89% |
| Tidak efektif | <75% |

Sumber : Mahmudi (2011: 171)

Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Tahun | Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) | presentase (%) | Kinerja |
|--------------|---|--|-----------------------|----------------|
| 2017 | 912.593.775.000,00 | 849.286.151.151,13 | 93,06 | Cukup Efektif |
| 2018 | 925.522.525.079,00 | 729.648.594.488,68 | 78,84 | Kurang Efektif |
| 2019 | 1.167.794.977.442,00 | 825.375.281.296,75 | 70,68 | Tidak Efektif |
| Rata-rata | | | 80,86 | Kurang Efektif |

Sumber : BPKAD Kabupaten Deli Serdang (diolah : 2021) dan Mahmudi (2011:162)

Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 sebesar 93,06% pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 14,23 persen menjadi 78,84 persen, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 8,16 persen menjadi 70,68 persen. Rata-rata rasio efektivitas PAD lebih dari 75%, berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memobilisasi penerimaan PAD belum sesuai dengan yang telah dianggarkan.

2. Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Dan sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.⁴³

a) Analisis Varian Belanja

Analisis varian belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Hasil perhitungan analisis varians belanja daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁴³ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2007) h.

Tabel 4.7
Perhitungan Varian Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Varian/Selisih (Rp) | Presentase (%) |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 2017 | 3.742.554.992.965,98 | 3.377.738.242.083,88 | 364.816.750.882,10 | 90,25 |
| 2018 | 3.822.171.768.018,30 | 3.422.610.573.014,61 | 399.561.195.003,69 | 89,55 |
| 2019 | 4.117.510.420.191,37 | 3.601.407.369.876,00 | 516.103.050.315,37 | 87,47 |
| Rata-rata | | | 426.826.998.733,72 | 89,09 |

Sumber : BPKAD Kabupaten Deli Serdang (diolah : 2021) dan Mahmudi (2011:162)

Kinerja belanja pemerintah daerah akan dinilai baik, apabila realisasi belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.⁴⁴ Berdasarkan tabel 4.7 dilihat dari analisis varian belanja daerah, tahun 2017 pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang menggunakan 90,25 persen dari jumlah yang dianggarkan, tahun 2018 menggunakan 89,55 persen dari jumlah yang dianggarkan, dan pada tahun 2019 menggunakan 87,47 persen dari jumlah yang dianggarkan.

b) Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja, serta bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dana pada belanja secara optimal.

1) Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatannya rendah.

⁴⁴ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2007) h.

Table 4.8
Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

| Kriteria Keserasian Belanja | Rasio Keserasian |
|-----------------------------|------------------|
| Tidak Serasi | 0%-20% |
| Kurang Serasi | >20%-40% |
| Cukup Serasi | >40%-60% |
| Serasi | >60%-80% |
| Sangat serasi | >80%-100% |

Sumber : Mahmudi (2011:162)

Hasil perhitungan belanja operasi terhadap total belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Tahun | Total Belanja Daerah (Rp) | Belanja Operasi | Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah (%) | Rasio Keserasian |
|-----------|---------------------------|----------------------|---|------------------|
| 2017 | 3.742.554.992.965,98 | 2.635.905.059.378,71 | 70,43 | Serasi |
| 2018 | 3.822.171.768.018,30 | 2.705.435.884.963,70 | 70,78 | Serasi |
| 2019 | 4.117.510.420.191,37 | 2.891.303.708.895,50 | 70,22 | Serasi |
| Rata-rata | | | 70,48 | Serasi |

Sumber : BPKAD Kabupaten Deli Serdang (diolah : 2021) dan Mahmudi (2011:162)

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar 70,43% digunakan untuk belanja operasi dari total belanja daerah, tahun 2018 pemerintah menggunakan 70,78% total belanja daerah untuk belanja operasi, dan tahun 2019 sebesar 70,22% dari total belanja daerah digunakan untuk belanja operasi.

Dari keseluruhan belanja operasi terhadap total belanja memiliki rata-rata sebesar 70,48% dari total belanja dan digunakan untuk belanja operasi, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Hasil 70,48% dapat dikategorikan serasi.

2) Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang

dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah justru memiliki tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi.

Table 4.10
Perhitungan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Tahun | Total Belanja Daerah (Rp) | Belanja Modal (Rp) | Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah (%) | Kinerja |
|-----------|---------------------------|--------------------|---|---------------|
| 2017 | 3.377.738.242.083,88 | 741.456.897.032,63 | 21,95 | Kurang Serasi |
| 2018 | 3.422.610.573.014,61 | 670.584.193.040,91 | 19,59 | Tidak Serasi |
| 2019 | 3.601.407.369.876,00 | 703.280.070.640,29 | 19,53 | Tidak Serasi |
| Rata-rata | | | 20,36 | Kurang Serasi |

Sumber : BPKAD Kabupaten Deli Serdang (diolah : 2021) dan Mahmudi (2011:162)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa keseluruhan rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017-2019 memiliki rata-rata sebesar 20,36%, artinya kinerja belanja modal dapat dikategorikan kurang serasi, pemerintah daerah menggunakan 20,36% dari total belanja daerah untuk belanja modal, yang meliputi: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

c) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.

Table 4.11
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

| Kriteria Efisiensi | Rasio Efisiensi |
|---------------------|-----------------|
| Efisiensi | < 100% |
| Efisiensi Berimbang | =100% |
| Tidak Efisien | >100% |

Sumber : Mahsun (2009: 187) dalam Rahmayati (2016)

Tabel 4.12
Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah
Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2017-2019

| Tahun | Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Rasio (%) | Kinerja |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 2017 | 3.742.554.992.965,98 | 3.377.738.242.083,88 | 90,25 | Efisiensi |
| 2018 | 3.822.171.768.018,30 | 3.422.610.573.014,61 | 89,55 | Efisiensi |
| 2019 | 4.117.510.420.191,37 | 3.601.407.369.876,00 | 87,47 | Efisiensi |
| Rata-rata | | | 89,09 | Efisiensi |

Sumber : BPKAD Kabupaten Deli Serdang (diolah : 2021) dan Mahmudi (2011:162)

Berdasarkan Tabel 4.12 tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 menggunakan 90,25% dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk belanja daerah. Tahun 2018 sebesar 89,55% dari total anggaran belanja digunakan untuk belanja daerah, hal ini menurun 0,7% . Dan pada tahun 2019 menurun sebesar 2,08% menjadi 87,47%.

Dari keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisiensi, hal ini berarti kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017-2019 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam penggunaan anggaran.

3. Analisis Kesesuaian Penyajian LRA BPKAD Kabupaten Deli Serdang Terhadap PSAP 02.

Analisis atas penyajian laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Deli Serdang disajikan dalam bentuk tabel antara perbandingan antara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 4.13
Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang

| No. | Unsur | PSAP 02 PP 71 Tahun 2010 | Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Deli Serdang | Sesuai | Tidak Sesuai |
|-----|---|---|---|--------|-----------------|
| 1. | Penyajian informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. | Paragraf 09 Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode. | Dalam Laporan Keuangan Deli Serdang menyajikan informasi berupa realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. | ✓ | |
| 2. | Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan. | Paragraf 10 Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan. | LRA BPKAD Kabupaten Deli Serdang terdapat informasi berupa : a. Nama entitas pelaporan (SKPD-SKPD yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang); b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan. | ✓ | |
| 3. | Periode Pelaporan | Paragraf 11 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. | LRA BPKAD Kabupaten Deli Serdang disajikan sekali dalam setahun. | ✓ | |
| 4. | Penyajian pos-pos dalam | Paragraf 14 Laporan Realisasi | Pos-pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran | ✓ | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|---|--|
| | Laporan Realisasi Anggaran | <p>Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan-LRA; Belanja; Transfer; Surplus/defisit-LRA; Penerimaan pembiayaan; Pengeluaran pembiayaan; Pembiayaan neto; dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA). | <p>BPKAD Kabupaten Deli Serdang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan; Belanja; Transfer; Surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran; Penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto; dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) | | |
| 5. | Penyajian Klasifikasi Pendapatan | <p>Paragraf 17</p> <p>Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.</p> | <p>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran hanya klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.</p> | ✓ | |
| 6. | Penyajian Klasifikasi Belanja | <p>Paragraf 18</p> <p>Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas</p> | <p>Penyajian klasifikasi belanja dalam LRA BPKAD Kabupaten Deli Serdang hanya menurut jenis belanja dalam dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> | ✓ | |

| | | Laporan Keuangan. | | | |
|-----|---|---|---|--|---|
| 7. | Penyajian Transfer Masuk | Paragraf 24 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. | Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengelompokkan pendapatan transfer meliputi : a. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan b. Transfer Pemerintah Pusat- lainnya c. Transfer Pemerintah Provinsi | | ✓ |
| 8. | Penyajian Belanja Operasi | Paragraf 36 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. | Dalam Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Deli Serdang belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. | | ✓ |
| 9. | Penyajian Belanja Modal | Paragraf 37 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. | Dalam Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Deli Serdang belanja modal meliputi : belanja tanah, peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja Irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. | | ✓ |
| 10. | Penyajian Belanja lain-lain/tak terduga | Paragraf 38 Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan | Dalam Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Deli Serdang, belanja lain- lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tidak | | ✓ |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. | berulang misalnya : penanggulangan bencana alam, bantuan sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya. | | |
| 11. | Penyajian klasifikasi pembiayaan | Paragraf 50 Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi | Penerimaan pembiayaan Kabupaten Deli Serdang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pinjaman, dan hasil investasi. | | ✓ |
| 12 | Dana Cadangan | Paragraf 54 Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Paragraf 57 Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. | Dalam Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang tidak terjadi pencairan dan pembentukan dana cadangan. | | ✓ |
| 13. | Penyajian Pengeluaran Pembiayaan | Paragraf 55 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. | Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Deli Serdang digunakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang. | ✓ | |
| 14. | Penyajian sisa lebih/kurang | Paragraf 60 SiLPA/SiKPA adalah | SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang | ✓ | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|---|--|
| | pembiayaan anggaran | selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Paragraf 61 Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. | menunjukkan kelebihan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dibanding belanja dan transfer dan pengeluaran pembiayaan dicatat selama satu periode pelaporan dalam pos SiLPA/SiKPA | | |
| 15. | Transaksi Dalam Mata Uang Asing | Paragraf 63 Transaksi dalam mata uang asing harus dibuktikan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. | Dalam LRA BKD Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2017-2019 tidak terdapat transaksi dalam mata uang asing. | ✓ | |

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran Kabupaten Deli Serdang terhadap PSAP 02 Tahun 2010. Acuan yang digunakan dalam melakukan analisis penyajian laporan keuangan BPKAD Kabupaten Deli Serdang adalah peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan yaitu basis akrual.

Dilihat dari unsur penyajian informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari satu entitas pelapor, PSAP 02 paragraf 9 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah seusai, bahwa LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dilihat dari unsur-unsur penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan

satuan angka yang digunakan. PSAP 02 paragraf 10 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa LRA harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan.

Dilihat dari unsur periode pelaporan, PSAP 02 paragraf 11 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dilihat dari unsur penyajian pos-pos dalam LRA, PSAP 02 paragraf 14 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos: pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Dilihat dari unsur penyajian klasifikasi pendapatan, PSAP 02 paragraf 17 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Dilihat dari unsur penyajian klasifikasi belanja, PSAP 02 paragraf 18 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA, klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dilihat dari unsur penyajian transfer masuk, PSAP 02 paragraf 24 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pusat dan dana alokasi dari pemerintah provinsi.

Dilihat dari unsur penyajian operasi, PSAP 02 paragraf 36 dengan laporan keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, hibah, dan bantuan sosial.

Dilihat dari unsur penyajian belanja modal, PSAP 02 paragraf 37 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak terwujud.

Dilihat dari unsur penyajian belanja lain-lain/tak terduga, PSAP 02 paragraf 38 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Dilihat dari unsur penyajian klasifikasi pembiayaan, PSAP 02 paragraf 50 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang tidak sesuai, bahwa penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi (penjualan Surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah). Dilihat dari unsur dana cadangan, PSAP paragraf 54 dan 57 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang tidak sesuai, bahwa pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan dan pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.

Dilihat dari unsur penyajian pengeluaran pembiayaan, PSAP paragraf 55 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum.daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Dilihat dari unsur transaksi dalam mata uang asing. PSAP 63 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa transaksi dalam mata uang asing harus dilakukan dalam mata uang rupiah.

Dilihat dari unsur penyajian sisa lebih.kurang pembiayaan anggaran, PSAP 60, dan 61 dengan Laporan Keuangan BPKAD Deli Serdang sudah sesuai, bahwa SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih\kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih.

C. Pembahasan

1. Analisis Kinerja Pendapatan

a) Varian Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan varian pendapatan menunjukkan bahwa tahun 2017 memiliki selisih sebesar Rp.166.388.581.530,87 atau 95,24%. Tahun 2018 memiliki selisih Rp.277.275.338.423,32 atau 92,38%. Tahun 2019 memiliki selisih Rp.436.274.779.604,25 atau 89,12%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa analisis varian pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar Rp.293.312.899.852,81 atau memiliki selisih positif, yang berarti kinerja pendapatan daerah baik. Dan dilihat dari tahun 2017 sampai 2019 realisasi pendapatan dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kabupaten Deli Serdang sudah mampu merealisasikan anggaran pendapatan.

Adapun pos-pos yang digunakan dalam penyusunan pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD Kabupaten Deli Serdang terutama pajak daerah menunjukkan realisasi lebih besar dari anggaran, hal ini memiliki arti tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak tinggi dan berdampak positif terhadap pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra, et. All (2016) menunjukkan hasil dalam kategori baik/positif. Dan hasil dari penelitian Kusumadewi dan Ilat (2016) juga menunjukkan bahwa analisis varians pendapatan di Kabupaten Minahasa Utara dalam kategori baik/positif. Pemerintah daerah dikaitkan memiliki kinerja baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan, begitu sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal tersebut dinilai kurang baik.⁴⁵

⁴⁵ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2007) h.

b) **Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2017-2019 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan PAD pada tahun 2018 sebesar -0,16% dan pertumbuhan TPD sebesar 0,1%. Pada tahun 2019 pertumbuhan PAD sebesar 0,13% dan 0,6%.

Meskipun dari segi persentase tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi pada PAD bahan presentasi untuk pertumbuhan total pendapatan daerah cadangan mengalami penurunan, akan tetapi kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam hal pertumbuhan pendapatan dikatakan positif, karena setiap tahun anggaran dari tahun 2017-2019 jumlah realisasi pendapatan daerah baik dari PAD dan TPD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, et. all (2016), hail menunjukkan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Jembrana dikatakan pertumbuhannya positif. Dan hasil penelitian Ropa (2016), hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Minahasa Selatan pertumbuhannya positif. Hasil penelitian.

c) **Rasio Derajat Desentralisasi**

Berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2017 sampai tahun 2019 derajat desentralisasi terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 sebesar 25,49%, tahun 2018 menurun sebesar 3,8% yaitu 21,69%, tahun 2019 kembali meningkat 1,41% menjadi 23,10%.

Meski mengalami turun naik, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki rata-rata sebesar 23,43% ini berarti derajat desentralisasi dinilai kurang baik. Jika kemampuan keuangan daerah kurang dari 20%, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih dinilai kurang dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Kemampuan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan masih kurang. Secara keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar 23,43% yang artinya

kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah masih sangat kurang.

Sejalan dengan penelitian Gramini, et. all (2017) menunjukkan hasil bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Morowali dinilai masih rendah. Dan penelitian Saputra, et. all (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi di Kabupaten Jember dinilai masih sangat kurang. Kemampuan keuangan untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.⁴⁶

d) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 sebesar 93,06% pada tahun 2018 mengalami penurunan 14,22% menjadi 78,84% pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali 8,16% menjadi 70,68%.

Rata-rata rasio efektivitas PAD kurang dari 100%, berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan kurang efektif. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD belum sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan, untuk meningkatkan PAD Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD guna untuk kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang harus dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya target realisasi pendapatan daerah dimaksudkan untuk mendorong kinerja pemerintah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

⁴⁶ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2007) h.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulangow, et. all (2016) menunjukkan hasil bahwa Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.

2. Analisis Kinerja Belanja

a) Analisis Varian Belanja Daerah

Kinerja belanja pemerintah daerah akan dinilai baik, apabila realisasi belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.⁴⁷ Berdasarkan hasil perhitungan analisis varian belanja daerah, tahun 2017 pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang menggunakan 90,25% dari jumlah yang dianggarkan, tahun 2018 menggunakan 89,55% dari jumlah yang dianggarkan, dan pada tahun 2019 menggunakan 87,47% dari jumlah yang dianggarkan.

Secara keseluruhan Kabupaten Deli Serdang selama tiga tahun memiliki rata-rata sebesar 89,09%, artinya kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai baik. Dimana tahun 2017-2019 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan kurang dari 100% dari jumlah yang dianggarkan. Namun, dari segi nominal jumlah realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan, jumlah tersebut masih relatif kecil dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja masih dinilai baik dan dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gramini, et. all (2017), yang menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki kinerja belanja yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Katir dan Pinatik (2016), juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Asmat memiliki kinerja belanja baik.

b) Rasio Keserasian Belanja Daerah

1) Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Berdasarkan perhitungan belanja operasi terhadap total belanja dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar 70,43% digunakan untuk belanja operasi dari total belanja daerah, tahun 2018 pemerintah menggunakan 70,78% total belanja

⁴⁷ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik.*(Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2007) h.

daerah untuk belanja operasi, dan tahun 2019 sebesar 70,22% dari total belanja daerah digunakan untuk belanja operasi.

Dari keseluruhan belanja operasi terhadap total belanja memiliki rata-rata sebesar 70,48% dari total belanja dan digunakan untuk belanja operasi, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gramini, et. all (2017) menunjukkan bahwa belanja operasi Kabupaten Morowali dinilai serasi. Dan penelitian Karir dan Pinatik (2016) menunjukkan bahwa belanja operasi Kabupaten Asmat juga dinilai serasi. Menurut Mahsun dalam Gramini, et. all (2011) hasil 70,48% dapat dikategorikan serasi.

2) **Belanja Modal terhadap Total Belanja**

Berdasarkan hasil perhitungan belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017-2019 memiliki rata-rata sebesar 20,36%, artinya kinerja belanja modal dapat dikategorikan kurang serasi. Pemerintah daerah menggunakan 20,36% dari total belanja daerah untuk belanja modal, yang meliputi: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gramini, et. all (2017) hasil menunjukkan bahwa belanja modal di Kabupaten Morowali dinilai kurang serasi. Penelitian Saputra, et. all (2016) menunjukkan bahwa belanja modal di Kabupaten Jembrana dinilai tidak serasi. Penelitian Palilingan, et . all (2015) hasil menunjukkan bahwa tahun 2010-2012 pada Dinas Pendapatan Kota Manado sebesar 17,4% dari total belanja digunakan untuk belanja modal. Hal ini mendukung pendapat Mahsun dalam Gramini (2017) jika nilai keserasian berkisar antara 0%-20%, artinya tidak serasi. Dari uraian dana perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih memprioritaskan belanja operasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing

satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

c) **Rasio Efisiensi Belanja**

Berdasarkan tabel perhitungan tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 menggunakan 90,25% dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk belanja daerah. Tahun 2018 sebesar 89,55% dari total anggaran belanja digunakan untuk belanja daerah, hal ini menurun 0,7%. Dan pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 2,08% menjadi 87,47%.

Dari keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien, hal ini berarti kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017-2019 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam penggunaan anggaran. Sejalan dengan penelitian Gramini, et. all (2017) juga menunjukkan hasil kinerja belanja pada Kabupaten Morowali efisien. Penelitian Kusumadewi dan Ilat (2016) menunjukkan bahwa kinerja belanja pada Kabupaten Minahasa Utara efisien. Dan Penelitian Tulangow dan Runtu (2016) kinerja belanja di Kabupaten Minahasa menunjukkan hasil efisiensi.

3. Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Deli Serdang Terhadap PSAP 02 PP 77 Tahun 2010

Terdapat 17 paragraf yang digunakan penulis untuk menyesuaikan laporan realisasi anggaran. Dari 17 paragraf tersebut, terdapat 3 aspek yang tidak sesuai dengan paragraf yang terdapat di PSAP 02 PP 71 Tahun 2010, aspek-aspek yang tidak sesuai yaitu paragraf 50 menjelaskan tentang penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi (penjualan surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah), tetapi dalam Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Deli Serdang penerimaan pembiayaan Kabupaten Deli Serdang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pinjaman, dan hasil investasi.

Paragraf 54 menjelaskan tentang pencarian dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, tetapi dalam Laporan

Keuangan Kabupaten Deli Serdang tidak terjadi pencairan dan pembentukan dana cadangan.

Keempat belas paragraf lainnya yaitu yang dijelaskan oleh paragraf 09, paragraf 10, paragraf 11, paragraf 14, paragraf 17, paragraf 18, paragraf 24, paragraf 36, paragraf 37, paragraf 55, paragraf 60, paragraf 61, dan paragraf 63, menunjukkan kesesuaian antara laporan keuangan BPKAD Kabupaten Deli Serdang dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis akrual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang:
 - 1) Berdasarkan hasil analisis Varian Pendapatan Daerah tahun anggaran 2017-2019 Kabupaten Deli Serdang dapat dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Kabupaten Deli Serdang sudah mampu merealisasikan anggaran pendapatan.
 - 2) Berdasarkan hasil analisis Pertumbuhan Pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2017-2019 mengalami pertumbuhan positif, karena pemerintah mampu mempertahankan/meningkatkan target pencapaian pendapatan dari tahun sebelumnya.
 - 3) Berdasarkan hasil analisis Rasio Derajat Desentralisasi meski terus mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki rata-rata sebesar 23,43% ini berarti derajat desentralisasi dinilai kurang baik.
 - 4) Berdasarkan hasil analisis Efektivitas PAD secara keseluruhan rata-rata dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang kurang efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas sebesar 80,86%.
2. Berdasarkan hasil analisis kinerja belanja daerah Kabupaten Deli Serdang:
 - a) Berdasarkan analisis Varian Belanja secara keseluruhan selama tiga tahun Kabupaten Deli Serdang memiliki rata-rata sebesar 89,09%, artinya kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang dinilai baik. Dimana tahun 2017-2019 pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan kurang dari 100% dari jumlah yang dianggarkan. Namun, dari segi nominal jumlah realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan, akan tetapi jumlah tersebut masih relatif kecil dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja masih dinilai baik dan dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.

- b) Berdasarkan hasil Analisis Keserasian Belanja dari keseluruhan Belanja Operasi terhadap Total Belanja memiliki rata-rata sebesar 70,48%, artinya kinerja belanja operasi dapat dikategorikan serasi
 - c) Berdasarkan hasil Analisis Keserasian Belanja dari keseluruhan Belanja Modal terhadap Total Belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017-2019 memiliki rata-rata sebesar 20,36%, artinya kinerja belanja modal dapat dikategorikan kurang serasi.
 - d) Berdasarkan hasil Efisiensi Belanja Daerah bahwa keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien, artinya kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017-2019 telah melakukan dalam penggunaan anggaran.
3. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian penyajian LRA Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, terdapat 17 yang dipergunakan penulis untuk menyesuaikan laporan realisasi anggaran. Terdapat 14 paragraf telah sesuai dengan PSAP 02, dan terdapat 3 paragraf belum sesuai yaitu paragraf 50, paragraf 54 dan paragraf 57.

B. Saran

Adapun Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
 - a. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebaiknya dapat meningkatkan PAD dengan cara menggali sumber-sumber yang menghasilkan pendapatan daerah melalui pajak daerah maupun retribusi daerah, revitalisasi (menghidupkan kembali) pasar, penyuluhan tentang arti pentingnya retribusi bagi pemerintah, penyuluhan kepada pemungut pajak untuk lebih intensif dalam pemungutan pendapatan daerah
 - b. Untuk kinerja belanja sebaiknya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat meningkatkan realisasi belanja pada belanja modal, dan tetap menginvestasikan belanja pada belanja operasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Diharapkan untuk dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan menambah rasio-rasio keuangan lainnya.
 - b. Dapat menambahkan periode tahun anggaran, agar lebih akurat.
 - c. Diharapkan kedepannya agar lebih akurat dalam menyesuaikan penyajian LRA Pemerintah Kabupaten lebih menyesuaikan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Ed. ke-3). Jakarta: Erlangga.
- Dien Jannah A.S, Tinangon Jantje, dan Walandouw Stanley. (2015) . Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Manado.*Jurnal EMBA. Vol. 3. No. 1: 534-541.*
- Bungin, Burhan. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama. Jakarta: kencana prenada media group.
- Erlina., Rambe, Omar Sakti., dan Rasdianto.(2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta : Salemba Empat
- Gramini, Media., Kasim, Muh. Yunus., dan Bidin, Cici Rianty K. (2017). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Marowali Pada Periode Tahun 2012-2014. Universitas Tadulako. *Jurnal Ilmu Manajemen. Vol 3 : 055-069.*
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. (2013).*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Ed. ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko Wiro A.(2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESA). Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 3.No. 12.*
- Ikhsan, Arfan, 2014, *Metodologi Penelitian BIsnis*, Bandung: Citapusaka Media.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta:

BPFE.

Katit, Fransiskus X. W., dan Pinatik Sherly.(2016). Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA. Vol. 4. No.3: 572-582.*

Kusumadewi, Niken W., dan Ilat Vintje (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014.Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA. Vol.4. No. 1: 634-644.*

Liando, Grace Y., dan Elim I.(2016). Analisis Kinerja Belanja dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sangihe. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA. Vol. 4 No. 1: 1473-1484.*

Lontaan, I. C dan Pangerapan Sonny. 2016. Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi. Manado.*
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=432843&val=1025
 &title.pdf](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=432843&val=1025&title.pdf) Diakses 26 April 2017.

Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UII Press.

Mahsun, Mohammad. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Makka, Al Harry., Saerang P.E. David., dan Elim, I. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu.Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15. No. 04: 324-333.*

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Percetakan Andi.
 Nordiawan Deddi, dkk. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

M. Syahman Sitompul, et.al. “Implementasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Masjid Di Sumatera Timur” dalam jurnal *akuntansi, Vol 3, (2): Juli-Des 2016*

- Noerdiawan, Dedi, Ayuningtiyas Herianti, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Ed. 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlaila, 2014, Pengantar Akuntansi, Bandung; Citapusaka Media.
- Palilingan, F. Anastasia., Sabijono, H., dan Mawikere, L. (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA. Vol. 3. No. 1:17-25.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Qur'an Surat Al-Furqan ayat 67
- Qur'an Surah Al-An'am ayat 135
- Ropa, Oktavia M. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA. Vol.4 No.2: 738-747.*
- Sagay, Brian. (2013). Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA. Vol. 1. No. 3: 1165-1174.*
- Saputra, Candra S., dan Yadiaatmaja F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. *E-Journal Bisma. Vol. 4.*
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerangka Konseptual, Paragraf 63
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods).* Cet. ke-dua. Bandung : Alfabeta
- Sundari., dan Supraptiningrum, Rr. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013. Universitas 17 Agustus 1945. Semarang. *Media Ekonomi dan Manajemen. Vol. 30. No. 1*

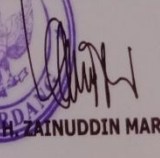
Tulangow P. Andre., dan Runtu Treesje.(2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 4. No.3:564- 571.


LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 2017 | REALISASI 2017 | (%) | REALISASI 2016 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 4 | PENDAPATAN - LRA | 3,498,428,422,033.00 | 3,332,039,840,502.13 | 95.24 | 3,112,343,380,366.96 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 912,593,775,000.00 | 849,286,151,151.13 | 93.06 | 573,010,351,004.96 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 582,022,000,000.00 | 553,610,032,994.03 | 95.12 | 426,484,851,696.80 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 112,908,775,000.00 | 59,691,146,500.00 | 52.87 | 64,803,586,982.36 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 19,800,000,000.00 | 20,064,116,991.00 | 101.33 | 17,259,675,200.00 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 197,863,000,000.00 | 215,920,854,666.10 | 109.13 | 64,462,237,125.80 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 2,583,126,945,033.00 | 2,476,079,377,351.00 | 95.86 | 2,539,333,029,362.00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 2,043,192,659,743.00 | 1,987,560,013,808.00 | 97.28 | 1,974,004,465,463.00 |
| 4.2.1.1 | Bagi Hasil Pajak - LRA | 70,601,021,224.00 | 58,285,466,161.00 | 82.56 | 68,499,789,985.00 |
| 4.2.1.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 2,295,883,519.00 | 1,202,371,818.00 | 52.37 | 2,344,197,826.00 |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 1,468,561,952,000.00 | 1,468,561,952,000.00 | 100.00 | 1,494,821,153,000.00 |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | 501,733,803,000.00 | 459,510,223,829.00 | 91.53 | 408,339,324,652.00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 303,060,286,000.00 | 303,060,286,000.00 | 100.00 | 272,774,758,000.00 |
| 4.2.2.3 | Dana Penyesuaian - LRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,011,114,000.00 |
| 4.2.2.4 | Dana Penyesuaian Dana Desa - LRA | 303,060,286,000.00 | 303,060,286,000.00 | 100.00 | 237,763,644,000.00 |
| 4.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 236,873,999,290.00 | 185,459,077,543.00 | 78.29 | 287,330,655,899.00 |
| 4.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,223,150,000.00 |
| 4.2.4 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Lainnya - LRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.4.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 2,707,702,000.00 | 6,674,312,000.00 | 246.49 | 0.00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 2,707,702,000.00 | 6,674,312,000.00 | 246.49 | 0.00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah - LRA | 3,742,554,992,965.98 | 3,377,738,242,083.88 | 90.25 | 3,005,435,386,844.06 |
| 5 | BELANJA | 2,901,273,807,166.82 | 2,635,905,059,378.71 | 90.85 | 2,443,150,929,029.43 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1,450,896,791,711.00 | 1,337,226,110,666.00 | 92.17 | 1,453,748,117,084.00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 912,691,537,309.82 | 767,900,875,243.71 | 84.19 | 576,429,462,720.43 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42,951,348,300.00 | 36,137,961,800.00 | 84.14 | 10,420,800,000.00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,324,285,962.00 |
| 6.1.3 | Belanja Bagi Hasil | 495,334,129,846.00 | 494,640,111,669.00 | 99.86 | 240,228,263,263.00 |
| 6.2.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 838,781,185,799.16 | 741,456,897,032.63 | 88.40 | 561,285,600,326.63 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 17,766,510,000.00 | 9,906,495,100.00 | 55.76 | 9,180,893,600.00 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 105,322,565,597.16 | 86,487,973,345.63 | 82.12 | 59,214,850,103.63 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 162,743,193,304.00 | 148,303,479,560.00 | 91.13 | 106,853,017,305.00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 509,307,279,598.00 | 460,088,450,911.00 | 90.34 | 383,499,309,118.00 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 43,641,637,300.00 | 36,670,498,116.00 | 84.03 | 2,537,530,200.00 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 2,500,000,000.00 | 376,285,672.54 | 15.05 | 998,857,488.00 |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | 2,500,000,000.00 | 376,285,672.54 | 15.05 | 998,857,488.00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | -244,126,570,932.98 | -45,698,401,581.75 | 18.72 | 106,907,993,522.90 |
| 7 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 7.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 258,613,972,571.98 | 258,627,938,571.98 | 100.01 | 156,705,979,049.08 |
| 7.1.1 | Penggunaan SILPA | 258,613,972,571.98 | 258,613,972,571.98 | 100.00 | 156,663,304,049.08 |
| 7.1.5 | Penerimaan Kembali Piutang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 | Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya | 0.00 | 13,966,000.00 | 0.00 | 42,675,000.00 |
| 7.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 14,487,401,639.00 | 14,000,000,000.00 | 96.64 | 5,000,000,000.00 |
| 7.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 14,487,401,639.00 | 14,000,000,000.00 | 96.64 | 5,000,000,000.00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 244,126,570,932.98 | 244,627,938,571.98 | 100.21 | 151,705,979,049.08 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | -0.00 | 198,929,536,990.23 | 0.00 | 258,613,972,571.98 |

Lubuk Pakam, 25 Mei 2018
PIH. BUPATI DELI SERDANG

H. ZAINUDDIN MARS

|  PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--------|-------------------|
| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 | (%) | REALISASI 2017 |
| 4 | PENDAPATAN - LRA | 3,640,579,921,809.07 | 3,363,304,583,385.75 | 92.38 | 3,332,039,840,502 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 925,522,525,079.00 | 729,648,594,488.68 | 78.84 | 849,286,151,151 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 720,622,000,000.00 | 558,329,598,200.97 | 77.48 | 553,610,032,994 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 97,195,838,000.00 | 38,794,665,624.00 | 39.91 | 59,691,146,500 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 19,800,000,000.00 | 35,636,472,727.00 | 179.98 | 20,064,116,991 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 87,904,687,079.00 | 96,887,857,936.71 | 110.22 | 215,920,854,666 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 2,561,040,878,836.00 | 2,478,181,849,298.00 | 96.76 | 2,476,079,377,351 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 2,007,320,996,209.00 | 1,992,298,798,336.00 | 99.25 | 1,987,560,013,800 |
| 4.2.1.1 | Bagi Hasil Pajak - LRA | 67,189,693,000.00 | 64,707,603,132.00 | 96.31 | 58,285,466,161 |
| 4.2.1.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 5,895,058,250.00 | 3,787,195,865.00 | 64.24 | 1,202,371,811 |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 1,468,561,952,000.00 | 1,468,561,952,000.00 | 100.00 | 1,468,561,952,000 |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | 465,674,292,959.00 | 455,242,047,339.00 | 97.76 | 459,510,223,821 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 271,906,373,000.00 | 271,727,069,600.00 | 99.93 | 303,060,286,000 |
| 4.2.2.4 | Dana Penyesuaian Dana Desa - LRA | 271,906,373,000.00 | 271,727,069,600.00 | 99.93 | 303,060,286,000 |
| 4.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 227,813,509,627.00 | 162,095,738,528.00 | 71.15 | 185,459,077,541 |
| 4.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 227,813,509,627.00 | 162,095,738,528.00 | 71.15 | 185,459,077,541 |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan - LRA | 54,000,000,000.00 | 52,060,242,834.00 | 96.41 | |
| 4.2.4.1 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 54,000,000,000.00 | 52,060,242,834.00 | 96.41 | |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 154,016,517,894.07 | 155,474,139,599.07 | 100.95 | 6,674,312,000 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah - LRA | 154,016,517,894.07 | 155,474,139,599.07 | 100.95 | 6,674,312,000 |
| 5 | BELANJA | 3,822,171,768,018.30 | 3,422,610,573,014.61 | 89.55 | 3,377,738,242,081 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 3,050,189,567,163.30 | 2,750,435,884,963.70 | 90.17 | 2,635,905,059,371 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1,503,519,296,488.25 | 1,368,382,862,625.00 | 91.01 | 1,337,226,110,661 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 994,563,536,957.05 | 849,819,593,705.70 | 85.45 | 767,900,875,241 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 87,133,637,450.00 | 67,270,475,142.00 | 77.20 | 36,137,961,801 |
| 6.2.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 464,973,096,268.00 | 464,962,953,491.00 | 100.00 | 494,640,111,661 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 766,982,200,855.00 | 670,584,193,040.91 | 87.43 | 741,456,897,031 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 5,697,058,679.00 | 4,779,281,950.00 | 83.89 | 9,906,495,101 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 104,853,224,535.25 | 92,782,929,035.12 | 88.49 | 86,487,973,341 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 167,891,460,520.00 | 148,303,288,275.77 | 88.33 | 148,303,479,541 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 446,277,722,462.00 | 391,099,656,542.00 | 87.64 | 460,088,450,911 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 42,262,734,658.75 | 33,619,037,238.02 | 79.55 | 36,670,498,111 |
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 5,000,000,000.00 | 1,590,495,010.00 | 31.81 | 376,285,611 |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | 5,000,000,000.00 | 1,590,495,010.00 | 31.81 | 376,285,611 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | -181,591,846,209.23 | -59,305,989,628.86 | 32.66 | -45,698,401,511 |
| | PEMBIAYAAN | | | | |
| 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 198,929,536,990.23 | 198,812,931,378.23 | 99.94 | 258,627,938,511 |
| 1.1 | Penggunaan SILPA | 198,929,536,990.23 | 198,810,731,378.23 | 99.94 | 258,613,972,511 |
| 1.6 | Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 13,966,000 |
| 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 17,337,690,781.00 | 16,327,690,781.00 | 94.17 | 14,000,000,000 |
| 2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 12,997,401,639.00 | 11,987,401,639.00 | 92.23 | 14,000,000,000 |
| 2.8 | Pembayaran Utang / Tunggakan Pada Pihak Ketiga | 4,340,289,142.00 | 4,340,289,142.00 | 100.00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 181,591,846,209.23 | 182,485,240,597.23 | 100.49 | 244,627,938,511 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0.00 | 123,179,250,968.37 | 0.00 | 198,929,536,990 |

Lubuk Pakam, 04 Mei 2019

BUPATI DELI SERDANG

H. ASHARI TAMBUNAN



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2018 | 2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 198,929,536,990.23 | 258,613,972,571.98 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 198,810,731,378.23 | 258,613,972,571.98 |
| Sub Total | 118,805,612.00 | 0.00 |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 123,179,250,968.37 | 198,929,536,990.23 |
| Sub Total | 123,298,056,580.37 | 198,929,536,990.23 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | (118,805,612.00) | 0.00 |
| Lain-lain | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | 123,179,250,968.37 | 198,929,536,990.23 |

Lubuk Pakam, 04 Mei 2019


BUPATI DELI SERDANG

H. ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 2019 | REALISASI 2019 | (%) | REALISASI 2018 |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 4 | PENDAPATAN - LRA | 4.009.331.169.223,00 | 3.573.056.389.618,75 | 89,12 | 3.363.304.583.385,75 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 1.167.794.977.442,00 | 825.375.281.296,75 | 70,68 | 729.648.594.488,68 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 945.382.220.000,00 | 652.563.113.786,79 | 69,03 | 558.329.598.200,97 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 96.109.838.000,00 | 34.182.703.026,25 | 35,57 | 38.794.665.624,00 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 25.780.000.000,00 | 22.017.441.824,00 | 85,41 | 35.636.472.727,00 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 100.522.919.442,00 | 116.612.022.659,71 | 116,01 | 96.887.857.936,71 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 2.376.832.923.781,00 | 2.279.470.240.722,00 | 95,90 | 2.478.181.849.298,00 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 2.054.904.857.733,00 | 2.000.833.953.938,00 | 97,37 | 1.992.298.798.336,00 |
| 4.2.1.1 | Bagi Hasil Pajak - LRA | 65.214.299.000,00 | 52.300.753.409,00 | 80,20 | 64.707.603.132,00 |
| 4.2.1.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 5.199.332.000,00 | 3.908.912.104,00 | 75,18 | 3.787.195.865,00 |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 1.516.175.120.000,00 | 1.513.584.154.000,00 | 99,83 | 1.468.561.952.000,00 |
| 4.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | 468.316.106.733,00 | 431.040.134.425,00 | 92,04 | 455.242.047.339,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.727.069.600,00 |
| 4.2.2.4 | Dana Penyesuaian Dana Desa - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.727.069.600,00 |
| 4.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 321.928.066.048,00 | 278.636.286.784,00 | 86,55 | 162.095.738.528,00 |
| 4.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 321.928.066.048,00 | 278.636.286.784,00 | 86,55 | 162.095.738.528,00 |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.060.242.834,00 |
| 4.2.4.1 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.060.242.834,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 464.703.268.000,00 | 468.210.867.600,00 | 100,75 | 155.474.139.599,07 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah - LRA | 158.316.320.000,00 | 161.823.960.000,00 | 102,22 | 155.474.139.599,07 |
| 4.3.3 | Pendapatan Lainnya - LRA | 306.386.948.000,00 | 306.386.907.600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | BELANJA | 4.117.510.420.191,37 | 3.601.407.369.876,00 | 87,47 | 3.422.610.573.014,61 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 3.196.312.243.662,03 | 2.891.303.708.895,50 | 90,46 | 2.750.435.884.963,77 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.552.964.231.778,00 | 1.426.203.584.060,00 | 91,84 | 1.368.382.862.625,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.101.703.088.984,03 | 926.112.632.460,50 | 84,06 | 849.819.593.705,77 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 26.325.110.000,00 | 23.690.410.000,00 | 89,99 | 67.270.475.142,00 |
| 6.2.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 515.319.812.900,00 | 515.297.082.375,00 | 100,00 | 464.962.953.491,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 906.198.176.529,34 | 703.280.070.640,29 | 77,61 | 670.584.193.040,50 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 47.192.512.600,00 | 17.972.661.400,00 | 38,08 | 4.779.281.950,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 153.981.640.080,34 | 112.483.290.455,46 | 73,05 | 92.782.929.035,11 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 151.368.476.609,00 | 131.336.367.981,83 | 86,77 | 148.303.288.275,11 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 527.720.963.405,00 | 417.973.501.999,00 | 79,20 | 391.099.656.542,44 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 25.934.583.835,00 | 23.514.248.804,00 | 90,67 | 33.619.037.238,11 |
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 15.000.000.000,00 | 6.823.590.340,21 | 45,49 | 1.590.495.010,00 |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | 15.000.000.000,00 | 6.823.590.340,21 | 45,49 | 1.590.495.010,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | -108.179.250.968,37 | -28.350.980.257,25 | 26,21 | -59.305.989.628,11 |
| 7 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 7.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 123.179.250.968,37 | 123.208.970.968,37 | 100,02 | 198.812.931.378,11 |
| 7.1.1 | Penggunaan SILPA | 123.179.250.968,37 | 123.179.250.968,37 | 100,00 | 198.810.731.378,11 |
| 7.1.6 | Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya | 0,00 | 29.720.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 7.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 15.000.000.000,00 | 11.500.000.000,00 | 76,67 | 16.327.690.781,11 |
| 7.2.2 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 15.000.000.000,00 | 11.500.000.000,00 | 76,67 | 11.987.401.639,11 |
| 7.2.8 | Pembayaran Utang / Tunggalan Pada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340.289.142,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 108.179.250.968,37 | 111.708.970.968,37 | 103,26 | 182.485.240.597,11 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | -0,00 | 83.357.990.711,12 | 0,00 | 123.179.250.968,37 |

Lubuk Pakam, Mei 2020
BUPATI DELI SERDANG

H. Ashari Tambunan
H. ASHARI TAMBUNAN



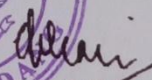
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2019 | 2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 123.179.250.968,37 | 198.929.536.990,23 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 123.179.250.968,37 | 198.810.731.378,23 |
| Sub Total | 0,00 | 118.805.612,00 |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 83.357.990.711,12 | 123.179.250.968,37 |
| Sub Total | 83.357.990.711,12 | 123.298.056.580,37 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 0,00 | (118.805.612,00) |
| Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | 83.357.990.711,12 | 123.179.250.968,37 |



Lubuk Pakam, Mei 2020

BUPATI DELI SERDANG

H. ASHARI TAMBUNAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Siti Nurul Atiqah
Nim : 0502161004
Tpt/Tgl Lahir : Lubuk Pakam, 02 Oktober 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Nangka II No.1 P. BSP

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Negeri 104244 Berijazah Tahun 2010
Tamatan MTS YPI AL-HIDAYAH Berijazah Tahun 2013
Tamatan SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Berijazah Tahun 2016
Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

Anggota Himpunan Pengusaha Muda Mandiri (2016)